



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

***LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP) 2020***

BAB I PENDAHULUAN

1. Gambaran Umum Organisasi

1.1. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta berorientasi kepada hasil (*Result-Oriented Government*). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Dasar utama penyusunan perangkat Daerah dalam bentuk suatu organisasi perangkat Daerah adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk kedalam organisasi tersendiri. Adapun dasar hukum dan sejarah keberadaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015;
2. UU No 03 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
3. UU No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
4. PP No 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan Provinsi sebagai OTODA;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan lembaran Negara 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2007 tentang Sistematika LKPJ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 tentang petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 12 tahun 2019 tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2020;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 tahun 2020 tentang perubahan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Rincian tugas, fungsi, dan tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nganjuk;
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 46 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023;
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 44 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Tahun Anggaran 2020;
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 188/774/K/411.012/2019 tentang umur ekonomis asset tetap dan nilai satuan minimum kapitalisasi asset tetap tahun anggaran 2019.

1.2. Struktur Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

1.2.1. Struktur Organisasi

Adapun Struktur Organisasi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk mengacu pada Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nganjuk. Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk sebagai berikut :

Kepala Dinas membawahi:

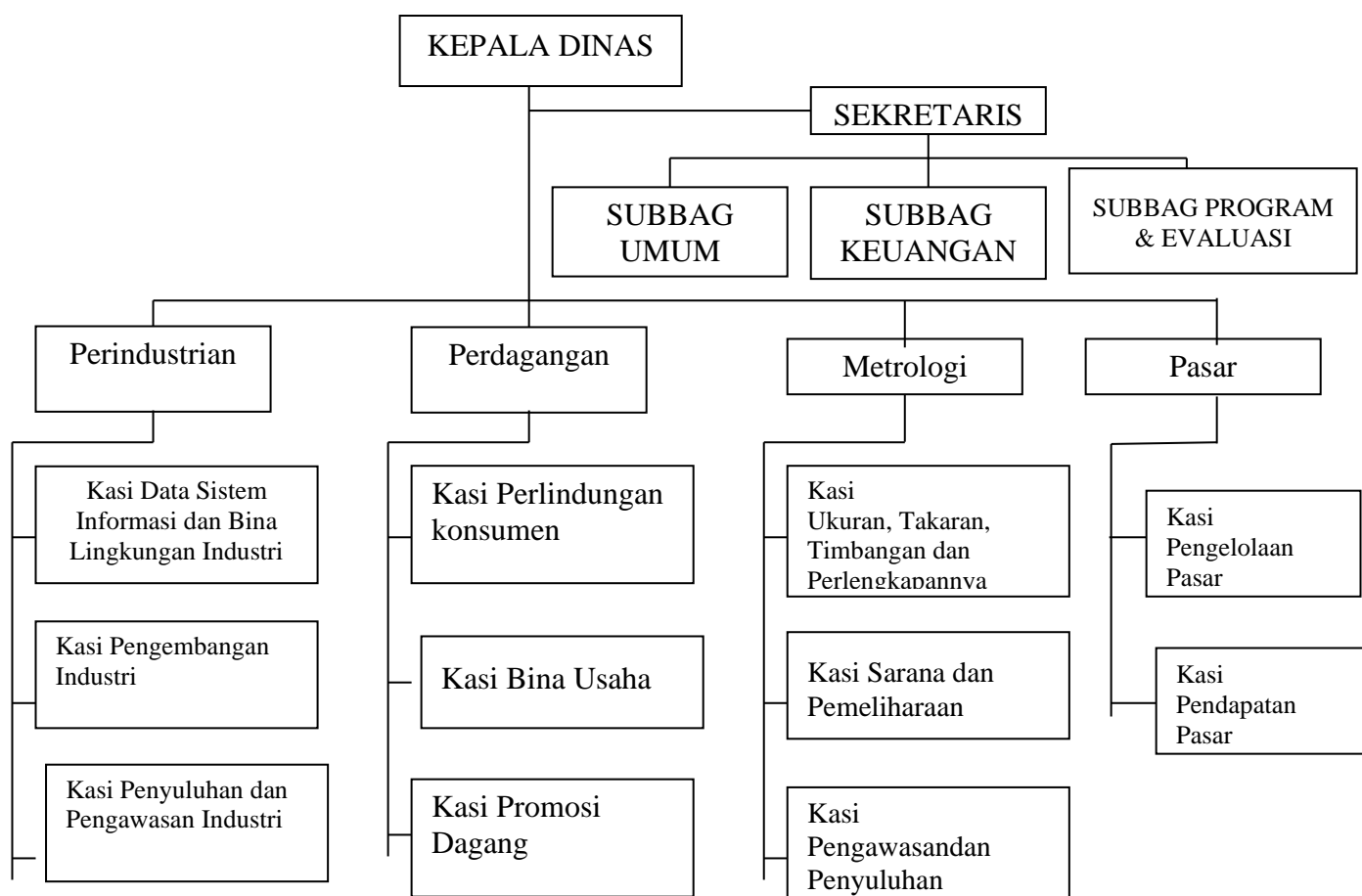
1. Sekretariat terdiri dari:

- a. Sub Bagian Umum
- b. Sub Bagian Keuangan

- c. Sub Bagian Program dan Evaluasi
- 2. Bidang Perindustrian :
 - a. Seksi Data, Sistem Informasi dan Bina Lingkungan Industri
 - b. Seksi Pengembangan Industri
 - c. Seksi Penyuluhan dan Pengawasan Industri
- 3. Bidang Perdagangan terdiri dari :
 - a. Seksi Perlindungan Konsumen
 - b. Seksi Bina Usaha
 - c. Seksi Promosi dagang
- 4. Bidang Metrologi terdiri dari :
 - a. Seksi Ukuran Takaran Timbangan dan Perlengkapannya
 - b. Seksi Sarana dan Pemeliharaan
 - c. Seksi Pengawasan dan Penyuluhan.
- 5. Bidang Pasar terdiri dari :
 - a. Seksi Pengelolaan Pasar
 - b. Seksi Pendapatan Pasar

STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. NGANJUK

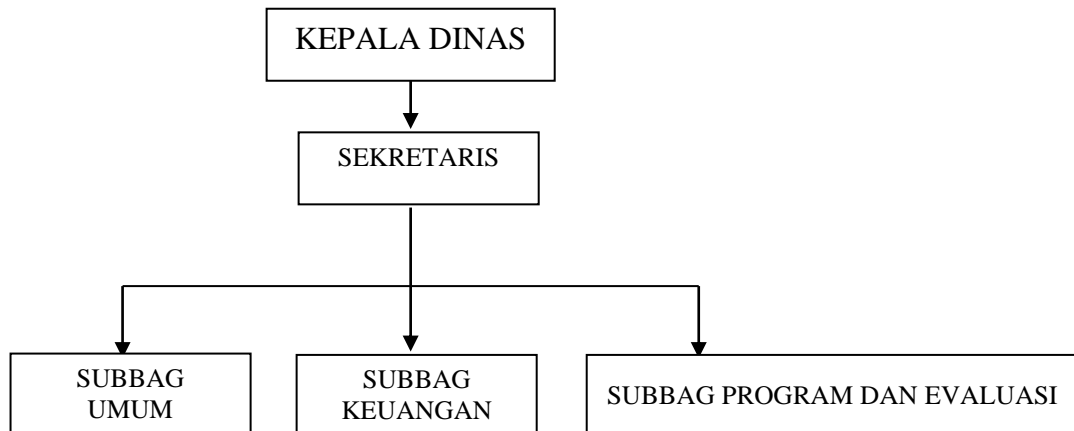


Kelompok Jabatan Struktural

I. Kepala Dinas

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, membina dan melaksanakan tugas di bidang Perindustrian dan Perdagangan.

II. Sekretariat



Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif.

Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan program dan evaluasi;
- b. pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- c. pelayanan administrasi;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretariat memiliki 3 sub bagian, yaitu :

1) Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum mempunyai tugas :

- a) melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan ketatalaksanaan;
- b) melaksanakan urusan kerumahtanggaan, perlengkapan dan keprotokolan;
- c) melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;
- d) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

2) Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai Tugas :

- a) menyiapkan bahan dan data untuk penyusunan anggaran;

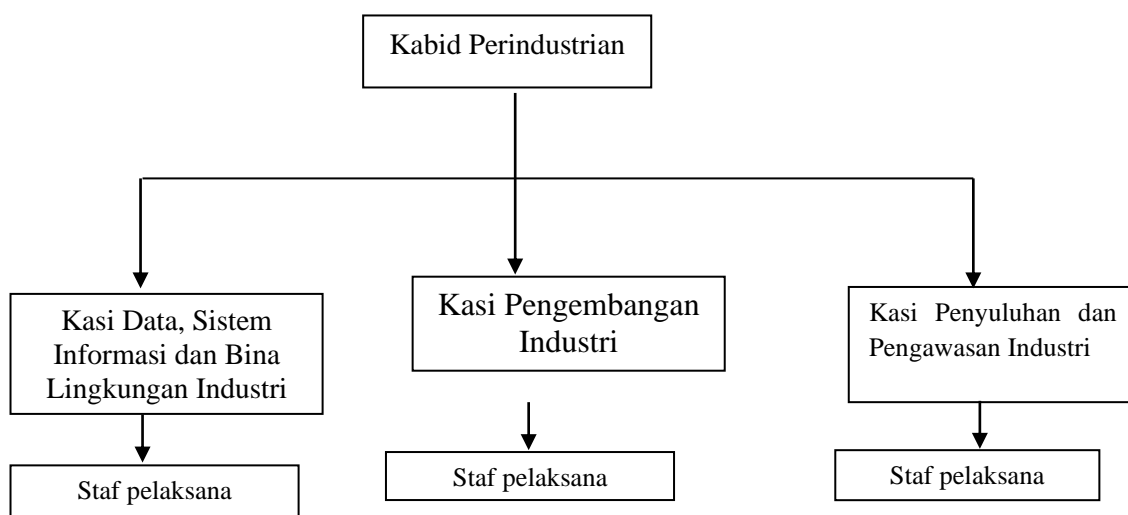
- b) menyusun rencana anggaran (RKA-SKPD dan DPA-SKPD);
- c) melaksanakan tertib administrasi keuangan;
- d) menyusun laporan keuangan;
- e) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

3) Sub Bagian Program dan Evaluasi

Sub Bagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas :

- a) melaksanakan koordinasi penyusunan program kegiatan;
- b) melaksanakan penyusunan program kegiatan;
- c) melaksanakan penyusunan laporan kegiatan;
- d) melaksanakan evaluasi pelaksanaan program;
- e) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

III. Bidang Perindustrian



Bidang Perindustrian mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan urusan pemerintah dan pelayanan umum, membina dan melaksanakan tugas di bidang Perindustrian.

Bidang Perindustrian mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perindustrian;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perindustrian;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perindustrian terdiri atas :

1) Seksi Data, Sistem Informasi dan Bina Lingkungan Industri

Seksi Data, Sistem Informasi dan Bina Lingkungan Industri mempunyai tugas:

- a) merumuskan kebijakan teknis di bidang data sistem informasi dan bina lingkungan industri;
- b) menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang data, sistem informasi dan bina lingkungan industri;
- c) membina dan melaksanakan tugas di bidang data, sistem informasi dan bina lingkungan industri;
- d) melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perindustrian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Seksi Pengembangan Industri

Seksi Pengembangan Industri mempunyai tugas :

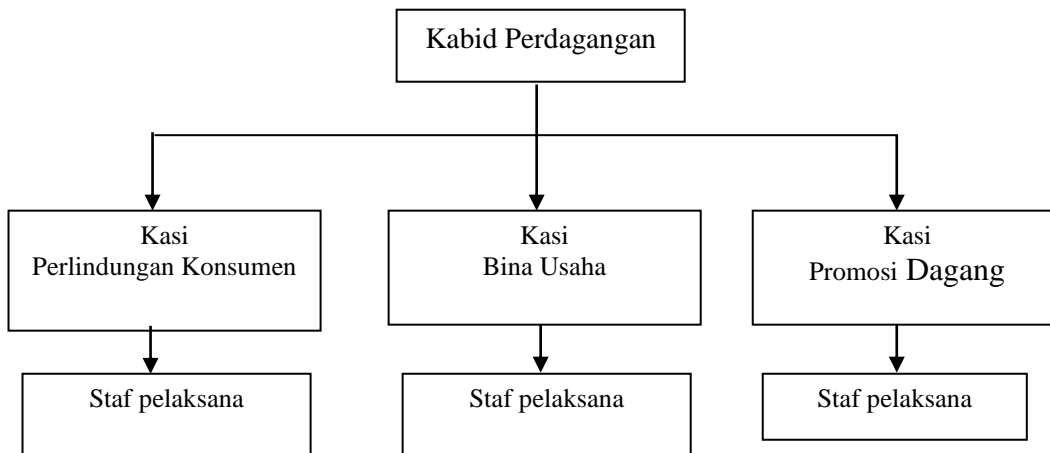
- a) merumuskan kebijakan teknis di bidang pengembangan industri;
- b) menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pengembangan Industri;
- c) membina dan melaksanakan tugas di bidang Pengembangan Industri;
- d) melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perindustrian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Seksi Penyuluhan dan Pengawasan Industri

Seksi Penyuluhan dan Pengawasan Industri mempunyai tugas:

- a) merumuskan kebijakan teknis di bidang penyuluhan dan pengawasan industri;
- b) menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penyuluhan dan pengawasan industri;
- c) membina dan melaksanakan tugas di bidang penyuluhan dan pengawasan industri;
- d) melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perindustrian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

IV. Bidang Perdagangan



Bidang Perdagangan mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, membina dan melaksanakan tugas di bidang perdagangan.

Bidang Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perdagangan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perdagangan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perdagangan;
- d. pemberian rekomendasi izin usaha perdagangan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Seksi Perlindungan Konsumen

Seksi Perlindungan Konsumen mempunyai tugas :

- a) merumuskan kebijakan teknis di bidang perlindungan konsumen;
- b) menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perlindungan konsumen;
- c) membina dan melaksanakan tugas di bidang perlindungan konsumen;
- d) melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perdagangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Seksi Bina Usaha

Seksi Bina Usaha mempunyai tugas :

- a) merumuskan kebijakan teknis di bidang Bina Usaha;
- b) menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Bina Usaha;

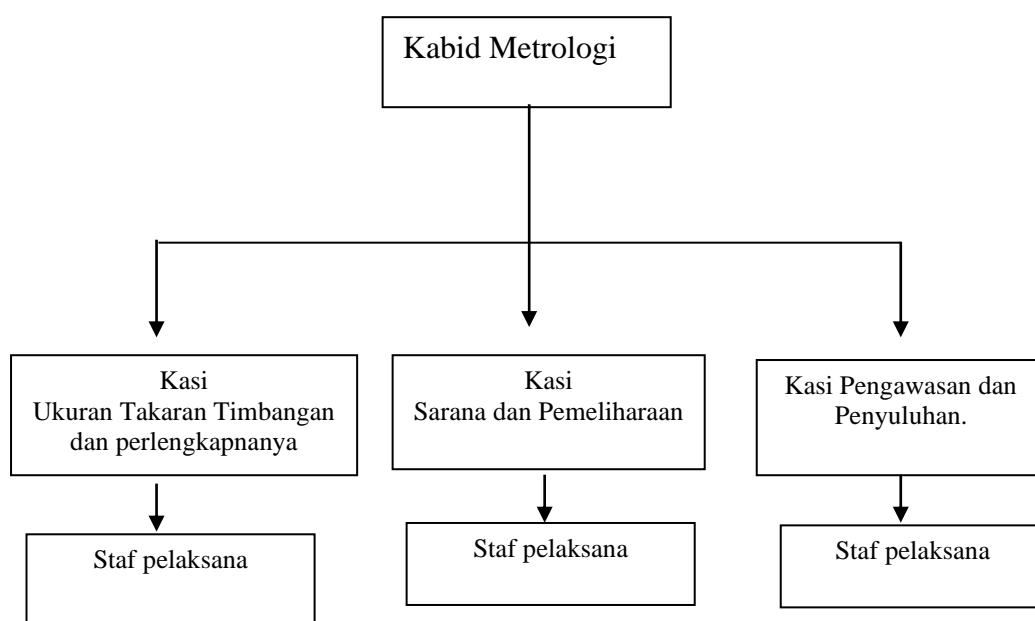
- c) membina dan melaksanakan tugas di bidang Bina Usaha;
- d) melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perdagangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Seksi Promosi Dagang

Seksi Promosi Dagang mempunyai tugas :

- a) merumuskan kebijakan teknis di bidang promosi dagang;
- b) menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang promosi dagang;
- c) membina dan melaksanakan tugas di bidang promosi dagang;
- d) melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang perdagangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

V. Bidang Metrologi



Bidang Metrologi Mempunyai Tugas merumuskan kebijakan Teknis, menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, membina dan melaksanakan tugas di bidang Metrologi.

Bidang Metrologi mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di Bidang Metrologi;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan, Pelayanan Tera dan atau Tera Ulang Ukuran Takaran Timbangan dan Perlengkapannya serta Pelayanan Kemetrologian Lainnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Metrologi;

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar sesuai dengan bidang tugasnya;

1. Seksi Ukuran Takaran Timbangan dan Perlengkapannya.

Seksi Ukuran Takaran Timbangan dan Perlengkapannya mempunyai tugas :

- a) merumuskan kebijakan teknis di bidang ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapannya;
- b) menyelenggarakan urusan pemerintahan, pelayanan tera dan/atau tera ulang ukuran takaran timbangan dan perlengkapannya serta pelayanan kemetrolagian lainnya kemetrolagian di bidang ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapannya;
- c) membina dan melaksanakan tugas di bidang ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapannya;
- d) melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang metrologi sesuai dengan tugas dan fungsinya;

2. Seksi Sarana dan Pemeliharaan.

Seksi Sarana dan Pemeliharaan Standar mempunyai tugas :

- a) menyiapkan bahan perencanaan program kerja kegiatan perkembangan sarana dan prasarana kemetrolagian;
- b) memelihara standar kerja dan standar laboratorium kemetrolagian;
- c) merencanakan pengembangan sumber daya, sarana dan prasarana pelayanan kemetrolagian;
- d) merencanakan kebutuhan, mendistribusikan dan monitor serta evaluasi cap tanda tera;
- e) melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Metrologi sesuai dengan tugas dan fungsinya;

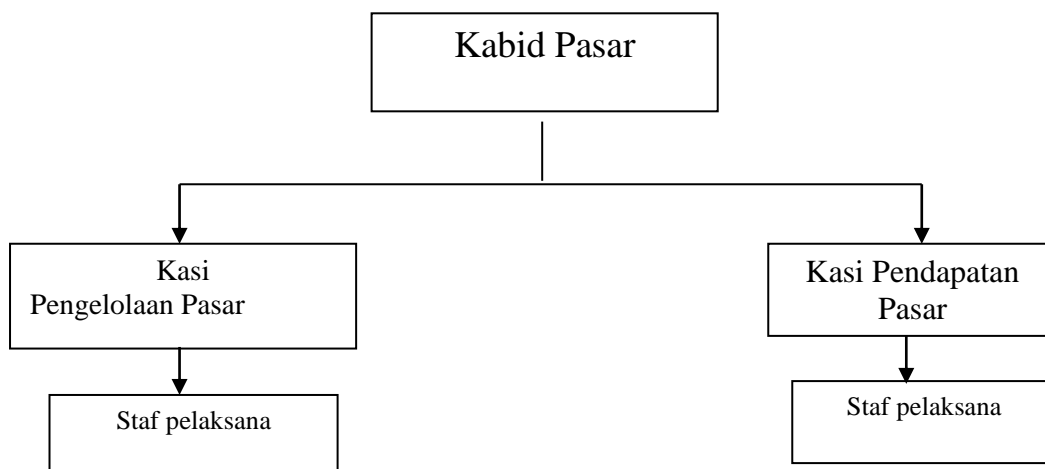
3. Seksi Pengawasan dan Penyuluhan.

Seksi Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai tugas :

- a) menyiapkan bahan perencanaan dan melaksanakan pengawasan terhadap ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapannya serta barang dalam keadaan terbungkus;
- b) melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pengawasan terhadap ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapannya serta barang dalam keadaan terbungkus;
- c) melaksanakan kegiatan ukur ulang kebenaran ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapannya serta barang dalam keadaan terbungkus;

- d) melaksanakan monitoring, evaluasi pertumbuhan perkembangan ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapannya serta barang dalam keadaan terbungkus;
- e) melaksanakan bimbingan dan penyuluhan kepada pembuat, importer dan reparatir ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapannya serta barang dalam keadaan terbungkus yang benar kepada konsumen;
- f) menyiapkan dan menyusun konsep leaflet, brosur dan penyuluhan kemetrolagian melalui media cetak maupun elektronik;
- g) melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Metrologi sesuai dengan tugas dan fungsinya;

VI. Bidang Pasar



Bidang Pasar mempunyai fungsi :

- a) perumusan kebijakan teknis di bidang pasar;
- b) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pasar;
- c) pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pasar;
- d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan tugas dan fungsinya

1) Seksi Pengelolaan Pasar

Seksi Pengelolaan Pasar mempunyai tugas :

- a) merumuskan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pasar;
- b) menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan pasar;

- c) membina dan melaksanakan tugas di bidang pengelolaan pasar;
- d) melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pasar sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Seksi Pendapatan Pasar

Seksi Pendapatan Pasar mempunyai tugas :

- a) merumuskan kebijakan teknis di bidang pendapatan pasar ;
- b) menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan pasar ;
- c) membina dan melaksanakan tugas di bidang pendapatan pasar;
- d) melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pasar sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2.2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk sesuai Peraturan Bupati Nganjuk nomor 41 tahun 2016 tentang kedudukan dan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut :

Tugas Pokok : Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Perindustrian dan Perdagangan.

F u n g s i :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Perindustrian dan Perdagangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang Perindustrian dan Perdagangan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perindustrian dan Perdagangan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3. Sumber Daya

1.3.1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset bagi suatu organisasi dan sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan untuk terwujudnya tujuan organisasi. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk pada akhir Desember 2020 sebanyak 87 orang. Data pegawai menurut Golongan dan Jabatan adalah sebagai berikut:

DATA ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN MENURUT GOLONGAN DAN JABATAN

U R A I A N	Satuan	Jumlah
a. Jumlah PNS		
1) Golongan I	Orang	4
2) Golongan II	Orang	50
3) Golongan III	Orang	26
4) Golongan IV	Orang	7
Jumlah	Orang	87
b. Jumlah Pejabat Struktural		
1) Eselon II	Orang	1
2) Eselon III	Orang	5
3) Eselon IV	Orang	11
c. Jumlah Pejabat Fungsional	Orang	-
d. Jumlah Staf PNS	Orang	70
Jumlah	Orang	87

Sedangkan data pegawai menurut jenjang pendidikan yang pernah dilalui adalah :

DATA ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN

No	Lulusan	Satuan	Jumlah
1	SD	Orang	4
2	SMP	Orang	12
3	SMA	Orang	39
4	Paket C	Orang	1
5	KPAA	Orang	1
4	D2	Orang	-
5	D3	Orang	1
6	S1	Orang	21
7	S2	Orang	8
8	S3	Orang	-
	Jumlah	Orang	87

Berdasarkan tabel data administrasi kepegawaian menurut golongan dan jabatan maka dapat dilihat bahwa tenaga kerja yang ada di dominasi oleh golongan II yaitu

sebesar 57,47 % dan menurut tabel data administrasi kepegawaian tingkat pendidikan maka tenaga kerja yang ada di dominasi oleh tingkat pendidikan SLTA yaitu sebesar 44,83 %. Meskipun dengan segala keterbatasannya, namun diharapkan tenaga kerja yang ada tetap mampu memberikan kontribusi serta kinerja yang lebih baik lagi bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk.

1.3.2. Sarana dan Prasarana

Pembangunan Daerah tidak dapat terlepas dari penyediaan prasarana dan sarana Daerah yang bersifat fisik. Tercukupinya Penyediaan sarana dan prasarana pendukung akan memiliki dampak yang signifikan terhadap keberhasilan organisasi. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk menempati aset berupa tanah dan bangunan berupa gedung yang terletak di Jalan Prof. RI. Gondowardojo, SH Nomor 12 Kel. Payaman Kec. Nganjuk. Terdapat 2 Gedung yang dipergunakan, yaitu sebuah gedung dengan luas 1414 m² untuk ruang kerja karyawan, serta gedung dengan luas 280 m² yang difungsikan sebagai ruang pertemuan / rapat.

Prasarana penerangan listrik telah memiliki instalasi tersendiri dan juga pada tahun 2020 telah dilakukan penambahan daya listrik kantor untuk semakin mengoptimalkan operasional kantor. Selain itu, sarana prasarana Komunikasi Telepon/Faximile juga telah terpasang, dan juga telah tersediannya prasarana jaringan internet untuk mengakses dan menambah wawasan, informasi dan peraturan terbaru. Prasarana mesin ketik komputer/printer yang ada kurang memadai dengan kebutuhan yang diperlukan baik jumlah maupun keadaan komputer tersebut. Sehingga diperlukan adanya tambahan dana pemeliharaan dan pengadaan baru secara bertahap, pada tahun mendatang. Untuk Prasarana furnitur perlu penambahan rak dan perbaikan serta penambahan furnitur baru.

Prasarana Kendaraan roda 2 (dua) sepeda motor yang ada sebanyak 12 (Dua Belas) unit, dengan keterangan 8 (delapan) unit dalam keadaan baik dan 4 (empat) unit dalam kondisi rusak. Pada Prasarana Kendaraan mobil dinas roda 4 (Empat), terdapat 6 (Enam) unit dengan kondisi 2 (Dua) unit dalam keadaan baik dan 4 (empat) unit perlu adanya penggantian baru. Terdapat juga prasarana Kendaraan Roda 3 yang dipergunakan sebagai armada pengangkut sampah di pasar sebanyak 3 (Tiga) Unit, dalam keadaan rusak dan perlu adanya pengadaan baru.

2. Permasalahan Utama SKPD

2.1. Permasalahan Internal

Dalam Melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perindustrian dan Perdagangan belum sepenuhnya terdukung oleh aspek Personil, sarana dan prasarana yang memadai, hal ini dapat di informasikan sebagai berikut :

a. Personil

Secara umum jumlah personil dilingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, belum mencukupi dan kualitas masih perlu ditingkatkan lagi melalui berbagai kegiatan penyegaran dengan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, workshop, seminar.

b. Sarana Prasarana

- 1) Kendaraan roda 2, roda 3 dan roda 4 masih belum memadai untuk kepentingan operasional;
- 2) Sarana penunjang kegiatan berupa peralatan Komputer dan printer belum mencukupi.
- 3) Sarana Pendukung Pengelolaan Pasar seperti Gerobak Sampah, Tong Sampah dan Tempat Pembuangan Sampah

c. Pendanaan

Biaya Operasional dan insetif belum menunjang untuk meningkatkan Kinerja dan kesejahteraan Sebagai upaya menghadapi kendala tersebut, sebagai alternatif jangka pendek ditempuh hal-hal sebagai berikut :

- a. Memantapkan Kelembagaan dan staf dengan langkah-langkah konkret, untuk mengefektifkan operasional pelayanan;
- b. Menumbuhkan partisipasi pihak-pihak yang terlibat dan peduli terhadap layanan;
- c. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan sebagai pengendalian dan motivasi;
- d. Melakukan Pelatihan dan diklat

Disamping upaya-upaya tersebut, juga telah direncanakan program pengembangan dengan menjalin kemitraan pihak ketiga/ masyarakat.

2.2. Permasalahan Eksternal

Pelaksanaan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk ditentukan oleh kondisi internal dan ditentukan pula oleh kondisi lingkungan diluar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk. Kondisi eksternal terdiri dari :



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Masih rendahnya daya saing industri dan perdagangan	Belum semua Industri Kecil dan Menengah mendaftarkan produk sesuai dengan yang seharusnya	Kurangnya pemahaman industri Kecil dan Menengah terhadap pentingnya standarisasi produk
		Industri kecil dan Menengah belum memanfaatkan sumber daya lokal yang ada	Kurangnya pemahaman Industri Kecil dan Menengah Terhadap Teknologi tepat guna
		Kurangnya Pemahaman Pelaku Usaha terhadap Kebutuhan Pasar	Kurangnya Pemahaman Pelaku Usaha Terhadap Kebutuhan Pasar
		Kurangannya Pemahaman Pelaku Usaha tentang berbagai Persyaratan dan Peraturan Perdagangan yang berlaku dinegara tujuan	Kurangnya Kepedulian Pelaku Usaha dalam Pemahaman Persyaratan dan Peraturan Perdagangan yang berlaku

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan

Tujuan pembangunan daerah ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan Kabupaten Nganjuk secara umum, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk pada khususnya dalam keterkaitan terhadap peran misi serta program yang telah ditetapkan. Adapun tujuan pembangunan Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Nganjuk tahun 2018–2023 adalah :

“Meningkatnya Kontribusi PDRB sektor industri dan Perdagangan berbasis pertanian dan potensi lokal”

2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat terukur.

Adapun Sasaran Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk yang ingin dicapai sebagai berikut :

1. Meningkatnya Sektor industri yang berdaya saing dengan Indikator sasaran:
 1. Persentase IKM yang terstandarisasi
 2. Persentase Peningkatan Usaha Industri
 3. Persentase Peningkatan IKM berbasis Produk Lokal
2. Meningkatnya Sektor Perdagangan yang berdaya saing dengan indikator sasaran:
 1. Persentase Peningkatan Volume Usaha perdagangan
 2. Nilai Ekspor

Sasaran strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten dicapai melalui 7 (Tujuh) Program yang dilaksanakan oleh masing-masing unit eselon III sesuai dengan tugas dan fungsinya. Adapun program tersebut adalah:

I. Bidang Perindustrian

Sasaran Meningkatnya sektor industri yang berdaya saing dialokasikan program / Kegiatan pendukungnya sebagai berikut :

- 1) Program Pengembangan Industri Kecil dan menengah
Kegiatan :
 - Pelatihan Pembuatan Makanan dan Minuman

- Penyusunan Raperda Rencana Pembangunan Industri
 - Penyusunan Buku Profil Sentra IKM
 - Pembinaan dan sosialisasi IKM
- 2) Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT)
- Kegiatan :
- Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui kegiatan pelatihan kerajinan dan pelatihan makanan minuman (DBHCHT)
- 3) Program Pembinaan Industri (DBHCHT)
- Kegiatan :
- Fasilitasi Kepemilikan hak atas kekayaan intelektual bagi industri kecil dan menengah (DBHCHT)

II. Bidang Perdagangan

Sasaran Meningkatnya Sektor Perdagangan yang berdaya saing dialokasikan program /Kegiatan pendukungnya sebagai berikut:

- 1) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
- Kegiatan :
- Sosialisasi Tera / Tera Ulang UTTP dan BDKT
 - Pengawasan UTTP, BDKT, dan satuan ukuran
 - Operasional dan Pengembangan UPT Kemetrollogian daerah
 - Pemeliharaan alat-alat Kemetrollogian
 - Lomba Pasar Tertib Ukur Untuk Menuju Daerah Tertib Ukur
- 2) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan
- Kegiatan :
- Sosialisasi dan pembinaan tertib niaga
 - Pengembangan potensi unggulan daerah
 - Peningkatan sistem promosi dan jaringan informasi
 - Pengembangan kelembangaan kerjasama kemitraan
 - Pendataan pelaku usaha
 - Pengembangan informasi harga dan barang penting lainnya
 - Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri
 - Fasilitasi bela beli produk unggulan Nganjuk
 - Penataan PKL (DID Tambahan 2020)
 - Pembinaan bagi pelaku usaha
 - Pelaksanaan Operasi Pasar

3) Program Pengembangan Pasar

Kegiatan :

- Penyusunan Raperda tentang Pengelolaan Pasar Daerah
- Sekolah pasar
- Pembinaan Pasar Daerah
- Biaya Pendukung Pengelolaan Pasar
- Pemeliharaan Fasilitas Umum
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Hewan Sukomoro (DID Tambahan 2020)

4) Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Illegal (DBHCHT)

Kegiatan :

- Pengumpulan informasi hasil tembakau dilekati pita cukai palsu tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai bukan haknya / salah personalisasi, dilekati pita cukai salah peruntukannya & dilekati pita cukai bekas di peredaran / tempat penjualan eceran (DBHCHT)

2.2. RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2020

Dengan berpedoman pada Rencana Strategis, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk menyusun Rencana Kerja (Renja) yang memuat kebijakan, Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran hasil program dan dirinci menurut sasaran output dan outcome pada tahun rencana, prakiraan sasaran tahun berikutnya, lokasi, pagu indikatif sebagai indikasi pagu anggaran serta cara pelaksanaannya.

2.3. PENETAPAN KINERJA/PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Penetapan/Perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan intruksi presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi, dan sesuai dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk.

Untuk menjamin tercapainya Sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk harus menjadi acuan

sekaligus landasan penyusunan strategi. Dari tujuan tersebut kemudian dirumuskan sasaran strategis. Sasaran strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk tahun 2019 telah ditetapkan dan dikelompokkan sebagaimana tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018-2023. Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk memuat 2 (Dua) Sasaran Strategis tersebut sebagai berikut :

1. Meningkatnya sektor industri yang berdaya saing
2. Meningkatnya sektor Perdagangan yang berdaya saing

Tabel 2.1

Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Pembangunan dan Pengembangan tahun 2018-2023

Tujuan	"Meningkatnya Kontribusi PDRB sektor industri dan Perdagangan berbasis pertanian dan potensi lokal"	
Sasaran Strategis	1. Meningkatnya sektor industri yang berdaya saing	2. Meningkatnya sektor Perdagangan yang berdaya saing

Tabel 2.2

Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Meningkatnya sektor industri yang berdaya saing	1	Persentase IKM yang terstandarisasi	%	18,90
	2	Persentase Peningkatan Usaha Industri	%	1,77
	3	Persentase Peningkatan IKM berbasis produk lokal	%	6,38
Meningkatnya sektor Perdagangan yang berdaya saing	1	Persentase Peningkatan Volume Usaha Perdagangan	%	5,78
	2	Nilai Ekspor	Rp	47 M

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan diukur dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator Sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2020 dengan realisasinya. Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan skala pengukuran standar pencapaian sebagai berikut :

Nilai (%)	Pencapaian
lebih dari 100%	Sangat Baik
75% - 100%	Baik
55% - 75%	Cukup
Dibawah 55%	Kurang

Tingkat capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2020 berdasarkan hasil pengukurannya dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya sektor industri yang berdaya saing	1 Persentase IKM yang terstandarisasi	18,90	19,14	101,27
		2 Persentase Peningkatan Usaha Industri	1,77	1,70	96,05
		3 Persentase Peningkatan IKM berbasis produk lokal	6,38	5,51	86,36
2	Meningkatnya sektor Perdagangan yang berdaya saing	1 Persentase peningkatan Volume Usaha Perdagangan	5,78	5,69	98,44
		2 Nilai Ekspor	47	38	80,85

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2019 dengan tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Tahun 2019			Tahun 2020		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya sektor industri yang berdaya saing	1	Persentase IKM yang terstandarisasi	18,50	18,13	98,00	18,90	19,14	101,27
		2	Persentase Peningkatan Usaha Industri	1,67	1,62	97,01	1,77	1,70	96,05
		3	Persentase Peningkatan IKM berbasis produk lokal	6,28	6,20	98,73	6,38	5,51	86,36
2.	Meningkatnya sektor Perdagangan yang berdaya saing	1	Persentase Peningkatan Volume Usaha Perdagangan	5,76	5,70	98,96	5,78	5,69	98,44
		2	Nilai Ekspor	45	48	106,67	47	38	80,85

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja s/d akhir periode RENSTRA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target Akhir RPJMD/RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1.	Meningkatnya sektor industri yang berdaya saing	1	Persentase IKM yang terstandarisasi	21,06	19,14	90,88
		2	Persentase Peningkatan Usaha Industri	2,00	1,70	85,00
		3	Persentase Peningkatan IKM berbasis produk lokal	6,68	5,51	82,49
2.	Meningkatnya sektor Perdagangan yang berdaya saing	1	Persentase Peningkatan Volume Usaha Perdagangan	5,84	5,69	97,43
		2	Nilai Ekspor	53 M	38 M	71,70

Tabel 3.4
Alokasi Per sasaran Pembangunan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Anggaran	% Anggaran
1.	Meningkatnya sektor industri yang berdaya saing	1	Persentase IKM yang terstandarisasi	255.000.000	4,21
		2	Persentase Pertumbuhan Usaha Industri	185.000.000	3,06
		3	Persentase Pertumbuhan IKM berbasis produk lokal	444.411.000	7,34
2.	Meningkatnya sektor Perdagangan yang berdaya saing	1	Volume Usaha Perdagangan Dalam Negeri	5.146.962.200	85,03
		2	Nilai Ekspor	21.890.000	0,36
TOTAL				6.053.263.200	

Tabel 3.5
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

No	Sasaran Strategis/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			
			Target	Realisasi	Capaian	Alokasi Dana	Realisasi	Capaian	
1	Meningkatnya sektor industri yang berdaya saing	1	Persentase IKM yang terstandarisasi	18,90	19,14	101,27	255.000.000	229.500.550	90,00
a.	Kegiatan Pembinaan dan Sosialisasi IKM					155.000.000	143.354.000	92,49	
b.	Kegiatan Fasilitasi Kepemilikan Hak Atas Kekayaan Intelektual Bagi Industri Kecil dan Menengah					100.000.000	86.146.550	90,03	
		2	Persentase Peningkatan Usaha Industri	1,77	1,70	96,05	185.000.000	154.083.620	83,28



No	Sasaran Strategis/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			
			Target	Realisasi	Capaian	Alokasi Dana	Realisasi	Capaian	
a.	Kegiatan Penyusunan Raperda Rencana Pembangunan Industri					117.000.000	98.611.820	84,28	
b.	Kegiatan Penyusunan Buku Profil Sentra IKM					68.000.000	55.471.800	81,58	
		3	Persentase Peningkatan IKM berbasis produk lokal	6,38	5,51	86,36	444.411.000	383.059.400	86,19
a	Kegiatan Pelatihan Pembuatan Makanan dan Minuman					294.411.000	272.252.150	92,47	
b	Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui kegiatan pelatihan kerajinan dan pelatihan makanan minuman					150.000.000	110.807.250	73,87	
2	Meningkatnya sektor Perdagangan yang berdaya saing	1	Persentase Peningkatan volume usaha perdagangan	5,78	5,69	98,44	5.146.962.200	4.902.888.182	95,26
a	Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan					397.400.050	363.768.155	91,54	
b	Program Peningkatan efisiensi perdagangan					771.972.100	707.290.528	91,62	



No	Sasaran Strategis/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			
			Target	Realisasi	Capaian	Alokasi Dana	Realisasi	Capaian	
e	Program Pengembangan Pasar					3.827.590.050	3.692.088.999,79	96,46	
f	Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal					150.000.000	139.740.500	93,16	
		2	Nilai Ekspor	47 M	38 M	80,85	21.890.000	18.600.500	84,97
a.	Kegiatan Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri					21.890.000	18.600.500	84,97	

Tabel 3.6
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi	
1.	Meningkatnya Sektor industri yang berdaya saing	1	Persentase IKM yang terstandarisasi	101,27	90,00	11,27
		2	Persentase Peningkatan Usaha Industri	96,05	83,28	12,77
		3	Persentase Peningkatan IKM berbasis produk lokal	86,36	86,19	0,17
2	Meningkatnya Sektor Perdagangan yang berdaya saing	1	Persentase Peningkatan Volume Usaha Perdagangan	98,44	95,26	3,18
		2	Nilai Ekspor	80,85	84,97	-4,12

Untuk tingkat efisiensi indikator kinerja nilai ekspor terjadi inefisiensi sebesar -4,12%. hal ini disebabkan karena setelah diadakan sosialisasi kepada pelaku usaha untuk melakukan

ekspor, dalam perjalanannya terkendala pandemic covid-19, sehingga berpengaruh terhadap permintaan negara yang dituju, yang mengakibatkan menurunnya nilai ekspor.

3.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

Sesuai Perubahan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 terdapat 1 (satu) Tujuan serta 2 (Dua) Sasaran, adapun analisa dari kedua sasaran strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk akan diuraikan sebagai berikut :

1. Sasaran Meningkatnya Sektor Industri yang Berdaya Saing

Untuk menilai sasaran ini diukur dengan indikator yaitu Persentase Industri Kecil Menengah yang terstandarisasi, Persentase Pertumbuhan Usaha Industri dan Persentase Pertumbuhan IKM berbasis produk lokal.

A. Analisis Penyebab Keberhasilan

Pada Tahun 2020 Persentase IKM yang terstandarisasi dengan target 18,90% telah terrealisasi sebesar 19,14 % dengan capaian kinerja sebesar 101,27%. Capaian tersebut termasuk kategori Sangat Baik karena dapat melampaui target yang telah ditentukan. Persentase Peningkatan Usaha Industri dengan target 1,77% telah terrealisasi sebesar 1,70% dengan capaian sebesar 96,05%. Capaian indikator kinerja ini termasuk kategori baik dengan capaian di atas 90%. Pada indikator kinerja Persentase Peningkatan IKM berbasis produk lokal dengan target 6,38%, telah terrealisasi sebesar 5,51% dengan capaian sebesar 86,36 %. Capaian indikator kinerja ini termasuk kategori baik. hal ini disebabkan karena banyaknya Industri Kecil menengah yang beralih pada produksi makanan dan minuman untuk berlangsungnya kehidupan sehari-hari serta Industri Kecil dan Menengah mendapatkan bantuan dari Pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten berupa penguatan modal sehingga meskipun omzetnya turun dapat bangkit lagi dan memproduksi lagi.

Untuk Sasaran peningkatan industri yang berdaya saing dapat tercapai dengan kategori Baik, Hal ini didukung oleh semakin sadarnya Industri Kecil Menengah (IKM) untuk menjadi semakin berstandar. Hal ini terlihat dari antusiasnya para pelaku IKM dalam mengikuti berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh Disperindag, seperti fasilitasi HAKI berupa merk, serta peningkatan ketrampilan untuk memperbaiki produk-produk mereka melalui berbagai pelatihan yang diadakan dan difasilitasi oleh Disperindag.

Dengan semakin berstandarnya produk-produk IKM dan makin beragam hasil produk-produknya maka industri Kecil dan Menengah (IKM) dapat meningkatkan daya saing di pasaran yang akhirnya juga dapat meningkatkan Pertumbuhan usaha industri. Selain itu dengan inovasi-inovasi yang diperoleh lewat pelatihan dan fasilitasi dapat meningkatkan potensi Industri Kecil dan Menengah (IKM) baru yang mempunyai berbagai terobosan yang dapat meningkatkan daya saing. Keberhasilan capaian Sasaran Meningkatnya sektor industri yang berdaya saing ini dapat dilihat pada hasil program kegiatan pembangunan sebagai berikut:

Tabel 3.7
Program Kegiatan Pembangunan Urusan Pilihan Perindustrian

No	Program	Satuan	Jumlah	Keterangan
1	Pengembangan industri kecil dan menengah	Buku Profil Sentra IKM	50	Pendataan Sentra IKM sebanyak 17 Sentra
		Orang	600	Terlaksananya Pelatihan Makanan dan Minuman yang dilaksanakan di 20 Kecamatan di Kab Nganjuk
		Raperda	1	Terlaksananya Penyusunan Raperda RPIK
		IKM	50	Terlaksananya Pembinaan dan Sosialisasi Industri Kecil dan Menengah yang dilaksanakan di Ruang Rapat Disperindag Nganjuk
		IKM	100	Terlaksananya Sosialisasi Sertifikasi Halal bagi Industri Kecil dan Menengah yang dilaksanakan di Ruang Rapat Disperindag Nganjuk
		Sertifikat Halal	15	Pengurusan Pendaftaran Fasilitasi Sertifikasi Halal
2.	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	IKM	30	Pelatihan Kerajinan dilaksanakan di Kel.Begadung Kec. Nganjuk
		IKM	30	Pelatihan Makanan dan Minuman dilaksanakan di Balai Desa Sambiroto Kec. Baron
3	Program Pembinaan Industri	IKM	40	Terlaksananya Fasilitasi kepemilikan HAKI bagi Industri Kecil dan Menengah

B. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka pencapaian sasaran meningkatnya sektor industri yang berdaya saing diukur dengan indikator yaitu Persentase IKM yang terstandarisasi dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp. 255.000.000 dan terrealisasi sebesar Rp. 229.500.550 atau sebesar 90,00 %, sedangkan untuk Persentase Peningkatan Usaha Industri dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp. 185.000.000 dan terrealisasi sebesar Rp. 154.083.620 atau sebesar 83,28%, Persentase peningkatan IKM berbasis produk lokal dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp. 444.411.000 dan terrealisasi sebesar Rp. 383.059.400 atau sebesar 86,19%.

Capaian realisasi anggaran telah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam upaya peningkatan pelaku usaha yang berdaya saing. Efisiensi penggunaan Anggaran dan realisasi program dapat digambarkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.8 Program Urusan Pilihan Perindustrian

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1.	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	634.411.000	569.689.770	89,80
2.	Program Pembinaan Industri (DBHCHT)	100.000.000	86.146.550	86,15
3.	Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT)	150.000.000	110.807.250	73,87
Jumlah		884.411.000	766.643.570	86,68

C. Analisis Program /Kegiatan yang menunjang keberhasilan/Kegagalan

Keberhasilan capaian indikator ini didukung melalui program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, Program Pembinaan Industri, serta Program Pembinaan Lingkungan Sosial.

2. Sasaran Meningkatnya sektor Perdagangan yang berdaya saing

Untuk menilai sasaran keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator Volume usaha Perdagangan Dalam Negeri.

A. Analisis Penyebab Keberhasilan

Pada Tahun 2020 Persentase Peningkatan Volume Usaha Perdagangan dengan target 5,78% telah terrealisasi sebesar 5,69% dengan capaian kinerja sebesar 98,44%. Capaian indikator Kinerja ini termasuk kategori baik, mengingat pada tahun ini terdapat pandemi COVID-19 yang memberikan dampak begitu luas terutama pada sektor perekonomian. Meskipun pandemi COVID-19 masih belum usai, namun perlahan para pelaku usaha mencoba bangkit dan menggerakkan roda perekonomian. Nilai Ekspor dengan target 47 Milyar telah terrealisasi sebesar 38 Milyar dengan capaian kinerja sebesar 80,85 %. Capaian indikator kinerja ini termasuk kategori baik. Keberhasilan Sasaran Meningkatnya sektor Perdagangan yang berdaya saing tahun 2020 didukung oleh hasil-hasil program kegiatan pembangunan sebagai berikut :

Tabel 3.9

Program Kegiatan Pembangunan Urusan Pilihan Perdagangan

No	Program	Satuan	Jumlah	Keterangan
1	Program Perlindungan konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Orang	70	Sosialisasi Tera/Tera Ulang dilaksanakan di Kecamatan Sukomoro dan Bagor, serta di Pasar Watudandang, Pasar Warujayeng, dan Pasar Ngronggot.
		Pelaku usaha	112	Peningkatan Pengawasan UTTP, BDKT dan Satuan Ukuran di laksanakan di 25 SPBU se-Kabupaten Nganjuk dan 16 pasar se-Kabupaten Nganjuk
		Unit	461	
		Lokasi	20	Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrolgian Daerah dilaksanakan di 20 Kecamatan di Kab Nganjuk
		Unit	461	Pemeliharaan alat-alat kemetrolgian
2	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	IKM	44	Pengembangan potensi unggulan daerah dilaksanakan di Surabaya, Yogyakarta, Malang, dan Jakarta
		IKM	120	Pengembangan Pusat Oleh-Oleh Kab. Nganjuk
		Lokasi	1	Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Kemitraan dilaksanakan di Surakarta
		Lokasi	14	Pelaksanaan Operasi pasar dilaksanakan di 14 Lokasi di Kab. Nganjuk
		Pelaku Usaha	100	Pengembangan potensi SDM bagi Pelaku



		Gudang SRG	1	Usaha
		Kegiatan	25	Pendampingan Sistem Resi Gudang (SRG) untuk pemeliharaan 1 Gudang (SRG) Fasilitasi Pembinaan bagi Pelaku Usaha (PKL Selatan GOR Bung Karno)
		Pasar	16	Melaporkan harga bahan pokok dan barang penting lainnya di 16 Pasar
		Orang	25	Sosialisasi & Pelatihan Meubel dilaksanakan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Tenda Wastafel	25 25	Fasilitasi Pengadaan Tenda Galvalum dan Wastafel untuk ditempatkan di tempat berjualan PKL Utara Gedung Mpu Sendok
5	Program Pengembangan Pasar	Orang	60	Sekolah Pasar yang dilaksanakan di Kota Surakarta
		Pasar	1	Biaya pendukung pengelolaan pasar dilaksanakan dengan pavingisasi Pasar Sawahan
		Pasar/THL/ Koordinator	33/ 200 / 23	Pemeliharaan Fasilitas Umur Pasar dilaksanakan di 33 pasar dan Honor 200 Tenaga harian lepas serta 23 koordinator Pasar
		Pasar	1	Biaya Dana Insentif Daerah (DID) dilaksanakan untuk pembangunan pasar hewan Sukomoro
		Aparatur dan pelaku usaha	238 dan 8.180	Pembinaan Pasar Daerah dilaksanakan untuk pembinaan aparatur dan pelaku usaha di pasar se Kab. Nganjuk
6	Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal	Kali	2	Sosialisasi Antisipasi Peredaran Rokok Ilegal
		Baliho Billboard	3 1	Pengadaan Billboard dan Baliho Sosialisasi Antisipasi Peredaran Rokok Ilegal
		Kali	15	Survey Lapangan Pengambilan Sample Rokok

B. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka pencapaian sasaran Meningkatnya sektor Perdagangan yang berdaya saing untuk menilai sasaran keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator persentase peningkatan Volume Usaha Perdagangan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 5.146.962.200 dan terrealisasi sebesar Rp.

4.902.888.182,79 atau sebesar 95,26%. Sedangkan pada Indikator Nilai Ekspor, dialokasikan anggaran sebesar Rp 21.890.000 dan terrealisasi sebesar Rp. 18.600.500 atau sebesar 84,97%. Dari berbagai capaian tersebut dapat terlihat bahwa capaian realisasi anggaran telah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan dapat dimanfaatkan secara maksimal. Anggaran dan realisasi program sebagaimana tabel berikut:

Tabel.3.10

Program Urusan Pilihan Perdagangan

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1)	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	397.400.050	363.768.155	91,54
2)	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan	793.862.100	725.891.028	91,44
3)	Program Pengembangan Pasar	3.827.590.050	3.692.088.999	96,46
4)	Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (DBHCHT)	150.000.000	139.740.500	93,16
Jumlah		5.168.852.200	4.921.488.682	95,21

C. Analisis Program /Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan

Keberhasilan capaian indikator ini didukung melalui Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan, Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan, Program Pengembangan Pasar, Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (DBHCHT).

3.3. REALISASI ANGGARAN

Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada tahun 2020 mendapat alokasi anggaran APBD belanja langsung dan tidak langsung sebesar Rp. 20.358.643.302 Terrealisasi sebesar Rp. 18.113.761.892 dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 9.676.062.522,- terrealisasi sebesar Rp. 7.859.990.679,- (81,23) sisanya sebesar Rp. 1.816.071.843,-
2. Belanja Langsung sebesar Rp. 6.944.867.891,- realisasinya sebesar Rp. 6.538.661.509,79 (94,15) Sisanya sebesar Rp. 406.206.381,21 dengan rincian sebagai berikut:

- Belanja Pegawai Pagu sebesar Rp. 995.545.000,- terrealisasi sebesar Rp. 902.550.000,- (90,66) sisanya sebesar Rp. 92.995.000,-
- Belanja Barang dan jasa Pagu sebesar Rp. 5.541.822.891,- Realisasi sebesar Rp. 5.230.101.869,79 (94,38) Sisanya sebesar Rp. 311.721.021,21,-
- Belanja Modal pagu sebesar Rp. 407.500.000,- Realisasi sebesar Rp. 406.009.640,- (99,63) Sisanya sebesar Rp. 1.490.360,-

Realisasi Per Program sebagai berikut:

Tabel 3.15
Realisasi Anggaran APBD per Program Tahun 2020

NO	Program	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1.	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	397.400.050	363.768.155	91,54
2.	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan	793.862.100	725.891.028	91,44
3.	Program Pengembangan Pasar	3.827.590.050	3.692.088.999,79	96,46
4.	Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (DBHCHT)	150.000.000	139.740.500	93,16
5.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	633.966.960	598.169.545	94,35
6.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	198.729.731	195.342.812	98,30
7.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	36.200.000	35.982.000	99,40
8.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	22.708.000	21.034.900	92,63
9.	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	634.411.000	569.689.770	89,80
10.	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	100.000.000	86.146.550	86,15
11.	Program Pembinaan Industri	150.000.000	110.807.250	73,87
Jumlah		6.944.867.891	6.538.661.509,79	94,15

BAB IV PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 merupakan laporan Pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan menuju *good governance* dengan mengacu pada Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2018-2023. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengacu pada Peraturan Presiden No 29 tahun 2014 tentang system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dilihat dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2020, secara umum sudah dapat memenuhi target yang ditetapkan dan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Untuk sasaran strategis Meningkatnya sektor industri yang berdaya saing, indikator Persentase IKM yang terstandarisasi dengan target 18,90% telah terrealisasi sebesar 19,14 % dengan capaian kinerja sebesar 101,27%. Capaian indikator Kinerja ini termasuk kategori Sangat Baik karena dapat melampaui target yang telah ditentukan. Pada Persentase Peningkatan Usaha Industri dengan target 1,77% telah terrealisasi sebesar 1,70% dengan capaian sebesar 96,05%. Capaian indikator kinerja ini termasuk kategori baik. Sedangkan untuk indikator Persentase Peningkatan IKM berbasis produk lokal dengan target 6,38% telah terrealisasi sebesar 5,51% dengan capaian sebesar 86,36%. Capaian indikator kinerja ini termasuk kategori baik. Pada segi anggaran, Penyerapan anggaran Indikator Persentase IKM yang terstandarisasi dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp. 255.000.000 dan terrealisasi sebesar Rp. 229.500.550 atau sebesar 90,00%. Pada indikator Persentase Peningkatan Usaha Industri, dialokasikan dengan anggaran sebesar Rp. 185.000.000 dan terrealisasi sebesar Rp. 154.083.620 atau sebesar 83,28%. Sedangkan Persentase peningkatan IKM berbasis produk lokal dialokasikan anggaran sebesar Rp. 444.411.000 dan terrealisasi sebesar Rp. 383.059.400 atau sebesar 86,19%.

2. Pada sasaran strategis Meningkatnya sektor perdagangan yang berdaya saing, Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Volume Usaha Perdagangan dengan target 5,78 telah terrealisasi sebesar 5,69 dengan capaian kinerja sebesar 98,44%. Capaian indikator Kinerja ini termasuk kategori baik. Nilai Ekspor dengan target 47 Milyar telah terrealisasi sebesar 38 Milyar dengan capaian kinerja sebesar 80,85%. Capaian indikator kinerja ini termasuk kategori baik karena melampaui jauh di atas target yang telah ditentukan. Sedangkan penyerapan anggaran indikator persentase peningkatan Volume Usaha Perdagangan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 5.146.962.200 dan terrealisasi sebesar Rp. 4.902.888.182 atau sebesar 95,26 % dan Nilai Ekspor dialokasikan anggaran sebesar Rp 21.890.000 dan terrealisasi sebesar Rp 18.600.500 atau sebesar 84,97%.

4.2. PERMASALAHAN

Pencapaian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk ditentukan oleh kondisi internal dan ditentukan pula oleh kondisi lingkungan eksternal yang ada. Kondisi eksternal terdiri dari:

1. Belum Semua Industri Kecil dan Menengah mendaftarkan produk sesuai dengan yang seharusnya
2. Industri Kecil dan Menengah belum memanfaatkan sumber daya lokal yang ada
3. Kurangnya Pemahaman Pelaku Usaha terhadap Kebutuhan pasar
4. Kurangnya Pemahaman Pelaku Usaha tentang berbagai persyaratan dan Peraturan Perdagangan yang berlaku dinegara tujuan

4.3. REKOMENDASI

Langkah-langkah kedepan yang harus dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk dalam memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan kedepan diantaranya adalah :

1. Fasilitasi Perijinan dan temu mitra usaha;
2. Mengusulkan bantuan Sarana dan Prasarana Produksi baik melalui dana APBD Kabupaten, APBD Kabupaten, APBD Provinsi serta APBN ;
3. Melaksanakan Pelatihan – Pelatihan dan Fasilitasi Akses modal Perbankan dan CSR;
4. Peningkatan ketrampilan, teknologi proses dan jaringan distribusi serta menyediakan fasilitas, konsultasi dan informasi bagi industri (utamanya industri kecil) dan perdagangan untuk memperluas akses pasar dan daya saing;

5. Penyediaan layanan informasi yang dapat digunakan oleh masyarakat, dunia usaha, pemerintah dan pihak-pihak yang membutuhkan serta berpartisipasi aktif dalam pameran-pameran; dan
6. Peningkatan ketertiban, Kebersihan dan keindahan pasar dengan didukung sarana dan prasarana yang memadai, penataan pedagang serta data yang akurat dan valid.

Nganjuk, Februari 2021

KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN NGANJUK



Dra. Rr Heni Rochtanti, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19630919 199003 2 006